

---

## KAPASITAS BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENGELOLA POTENSI DESA KACARIBU KECAMATAN KABANJAHE KABUPATEN KARO

**Siska Gracelia Pandia<sup>1</sup>, Dra.Asima Yanty S Siahaan, M.A.,Ph.D<sup>2</sup>**

**Universitas Sumatera Utara, Medan**

e-mail: [siskagracelia@gmail.com](mailto:siskagracelia@gmail.com)

**Abstract:** BUMDes is a business entity whose entire or most of the capital is owned by the village to manage assets, services, and other businesses to increase village independence. The limited quality of human resources both in the form of experience and knowledge is the main problem faced by BUMDes Lau Siangin. This study aims to describe in depth the capacity of village-owned enterprises in managing the potential of Kacaribu Village, Kabanjahe District, Karo Regency through a business unit managed by BUMDes. The research method used in this study is a descriptive research method with qualitative analysis techniques to describe the actual phenomenon of events in the field. The results show that the capacity of Lau Siangin Village Owned Enterprises (BUMDes) is still experiencing obstacles in managing village potential in Kacaribu Village. This can be seen from human resources who do not have professionalism in managing village potential because most BUMDes managers are part-time employees who have other jobs besides BUMDes. Also, financial resources to support implementation activities have not yet met the needs of each business unit. Thus, BUMDes Lau Siangin needs to increase capacity in managing village potential through capacity development programs by cooperating with government and private parties, providing training to all employees and increasing direct supervision.

**Keywords:** Capacity, BUMDes, Village Potential Management.

**Abstrak:** BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa untuk mengelola aset, jasa, dan usaha lainnya untuk meningkatkan kemandirian desa. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia baik dalam bentuk pengalaman maupun pengetahuan merupakan masalah utama yang dihadapi oleh BUMDes Lau Siangin. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam Kapasitas Badan Usaha Milik Desa dalam Mengelola Potensi Desa Kacaribu Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo melalui unit usaha yang dikelola BUMDes. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan teknik analisis kualitatif guna menggambarkan fenomena sebenarnya dari kejadian dilapangan. Hasil penelitian menunjukkan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lau Siangin masih mengalami hambatan dalam pengelolaan potensi desa di Desa Kacaribu. Hal ini dapat dilihat sumber daya manusia yang belum memiliki profesionalitas dalam mengelola potensi desa yang disebabkan sebagian besar pengelola BUMDes adalah karyawan paruh waktu yang memiliki pekerjaan lain selain di BUMDes. Juga sumber daya keuangan untuk mendukung kegiatan pelaksanaan masih belum memenuhi keperluan di tiap unit usaha. Dengan demikian, BUMDes Lau Siangin perlu peningkatan kapasitas dalam pengelolaan potensi desa melalui program pengembangan kapasitas dengan menjalin kerjasama kepada pihak pemerintah maupun swasta, memberikan pelatihan kepada seluruh pegawai dan meningkatkan pengawasan secara langsung.

**Kata kunci:** Kapasitas, BUMDes, Pengelolaan Potensi Desa.

## PENDAHULUAN

Pentingnya pembangunan nasional dalam suatu negara merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat. pemerintah giat melaksanakan program-program pembangunan ekonomi yang meliputi usaha-usaha untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif serta mempertinggi tingkat pendapatan masyarakat. Pembangunan suatu negara dapat diarahkan pada tiga hal yaitu meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat, meningkatkan standar hidup masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses baik kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial dalam kehidupannya. (Todaro, 2004:127). Pembangunan juga merupakan suatu usaha yang mampu meningkatkan kualitas hidup dengan cara menggunakan potensi atau sumberdaya alam yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Potensi dapat berupa sumberdaya alam, sumberdaya manusia serta sumberdaya buatan (infrastruktur, sarana prasarana atau lain-lain). Apabila sumber daya yang dikelola dapat dimanfaatkan dengan baik maka akan menentukan tingkat keberhasilan suatu pembangunan. Selain itu, pembangunan juga memiliki tujuan untuk membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan.

Salah satu bentuk pengelolaan potensi desa yaitu melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bab X Pasal 87 ayat 1 yang berbunyi Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes. Badan Usaha Milik Desa dibentuk untuk mengakomodir dan menampung potensi-potensi yang terdapat di desa agar dimanfaatkan oleh masyarakat desa untuk mendapatkan penghasilan yang kemudian diharapkan mampu menggerakkan perekonomian desa.

Pendirian BUMDes merupakan jalan untuk membentuk ekonomi pedesaan yang mandiri sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pengembangan BUMDes perlu dilakukan agar BUMDes yang telah berdiri dapat berfungsi sesuai dengan peranannya. Tujuan dan sasaran BUMDes dapat tercapai jika BUMDes dikelola secara terarah dan profesional. kunci kesuksesan dalam (BUMDes). Dengan unit usaha BUMDes, baik wisata, jasa, simpan pinjam dan sebagainya, akan berkontribusi untuk memulihkan ekonomi nasional di tingkat desa. ([https://kemendes.go.id/berita/view/detil/37767\\_7654/bu\\_mdes-jadi-kunci-pemulihan-ekonomi-tingkat-desa](https://kemendes.go.id/berita/view/detil/37767_7654/bu_mdes-jadi-kunci-pemulihan-ekonomi-tingkat-desa), diakses pada 13 Maret 2018). Keberadaan BUMDes di Indonesia masih belum berjalan secara maksimal, berdasarkan data kemendes terhadap 8.220 BUMDes, menunjukkan sebanyak 3.188 BUMDes yang didirikan tidak beroperasi, 1.670 BUMDes belum memberi kontribusi bagi pendapatan desa, 1.034 BUMDes tidak menyampaikan laporan, dan 2.328 BUMDes belum didukung oleh pengelola yang kompeten. (<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190529101814532-399423/bpk-bumdes-belumberkontribusi-penuh-pada-ekonomi-desa> diakses pada 29 Mei 2019). Salah satu daerah yang mengembangkan dan membentuk BUMDes di setiap Desa adalah Pemerintah Kabupaten Karo. Pembentukan BUMDes di Kabupaten Karo telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2016 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik desa. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo tercatat dari 258 desa yang ada di Kabupaten Karo terdapat 162 BUMDes yang telah berdiri. Hal tersebut merupakan semangat positif bagi desa untuk pembentukan BUMDes dalam memajukan desa. Namun dari data

tersebut, tidak semua BUMDes berkembang dan berjalan. Berikut data BUMDes di Kabupaten Karo Tahun 2020.

**Tabel. BUMDes Kabupaten Karo 2020**

Status	Jumlah
Berkembang	1
	6
Tidak Berkembang	2
	5
Rintisan	1
	2
	1
Tidak Memiliki	9
	7
<b>Total</b>	<b>2</b>
	<b>5</b>
	<b>8</b>

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo, 2020

Dari Total 162 BUMDes yang ada di Kabupaten Karo menunjukkan bahwa kebanyakan klasifikasi BUMDes berada di tahap rintisan, Artinya setiap desa yang mempunyai BUMDes dalam mengelola beberapa unit usaha masih mencari model kerja per unit usaha yang ada, serta pembagian tugas di masing-masing pengurusannya. Sedangkan klasifikasi BUMDes di tahap tidak berkembang BUMDes yang ada sudah mengetahui model kerja per unit usaha yang ada, akan tetapi belum rutin memberikan laporan untung rugi dari modal yang diberikan oleh Pemerintah Desa. Pada tahap berkembang BUMDes yang ada sudah memiliki rule kerja unit usaha yang di BUMDes dibawah Direktur yang membawahi kepala unit usaha dan memberikan laporan kepada pemerintah desa atas modal yang sudah diberikan.

**Tabel. BUMDes Kecamatan Kabanjahe 2020**

No	Desa	Nama Bumdes	Status
1.	Kacaribu	Lau Siangin	Berkembang

2.	Lau Simomo	Arih Ersada	Berkembang
3.	Rumah Kabanjahe		Tidak ada
4.	Kaban		Tidak ada
5.	Ketaren		Tidak ada
6.	Samura		Tidak ada
7.	Sumbe r Mufak at		Tidak ada
8.	Kandibat a		Tidak ada

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo, 2020

Salah satu BUMDesa di Kecamatan Kabanjahe yang berkembang sektor usahanya yaitu BUMDesa Lau Siangin Desa Kacaribu. BUMDes Lau Siangin merupakan salah satu BUMDes berkembang di Kabupaten Karo dan satu-satunya BUMDesa berkembang di Kecamatan Kabanjahe. Desa Kacaribu memiliki luas wilayah berjumlah 186 Ha ,dimana sepertiga kawasannya merupakan kawasan persawahan yang berjumlah 62 Ha.

Masalah sumber daya ini juga menjadi salah satu hambatan yang ditemui pada BUMDes Lau Siangin, karena dapat dilihat dari kompetensi sumber daya manusianya yang masih kurang memadai, berangkat dari masyarakat desa yang masih awam dalam menjalankan dan belum berpengalaman dalam pengelolaan badan usaha juga belum dapat bekerja secara produktif dalam mencari dan menciptakan inovasi-inovasi untuk mengolah sumber daya yang dimiliki desa. tingkat pendidikan pengurus BUMDes rata-rata memiliki latar belakang pendidikan SMA sehingga masih kurang memiliki kemampuan dan keahlian dalam menciptakan inovasi-inovasi untuk mengolah sumber daya

yang dimiliki desa begitu juga dengan kondisi sumber daya materialnya seperti sumber dana sangat terbatas.

Oleh karena itu, berdasarkan adanya beberapa permasalahan dan hambatan yang muncul dalam mengembangkan dan keberhasilan dalam menjalankan BUMDes di Desa Kacaribu Kabupaten Karo pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui lebih jauh hambatan dan permasalahan dalam pengembangan BUMDes agar dapat mengatasi dan meningkatkan pembangunan Desa Kacaribu Kabupaten Karo. Melihat kondisi diatas, penulis terdorong melakukan penelitian dengan Judul : “Kapasitas Badan Usaha Milik Desa dalam Mengelola Potensi Desa Kacaribu Kabupaten Karo”

### **Kapasitas**

Kapasitas berasal dari bahasa Belanda, yaitu *capaciteit* yang artinya daya tampung, daya serap, ruang atau fasilitas yang tersedia dan kemampuan secara maksimal. Milen (2006: 12) mendefinisikan kapasitas sebagai kemampuan individu, organisasi atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efektif, efisien dan terus-menerus.

Secara sederhana kapasitas dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu dalam rangka untuk mencapai tujuan. Hal ini diperkuat dengan pendapat yang dikemukakan oleh Goodman (1998 : 258) bahwa “Capacity is ability to carry out stated objectives”. Kapasitas adalah kemampuan untuk melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan.

### **Kapasitas Organisasi**

Kapasitas organisasi merupakan sebuah konsep yang menjadi perhatian sektor publik beberapa tahun terakhir. Organisasi publik dihadapkan pada fenomena dimana peningkatan arus mobilitas publik tinggi serta penggunaan ilmu dan teknologi menjadi tantangan bagi organisasi publik untuk dapat menyesuaikan terhadap tantangan tersebut. Kapasitas dalam organisasi

secara luas didefinisikan sebagai kemampuan untuk memenuhi tujuan yang berfokus pada pemahaman variabel - variabel yang mempengaruhi kinerja. Kapasitas yang dimiliki suatu organisasi akan sangat mempengaruhi kualitas kinerja keseluruhan dari organisasi. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Merilee S. Grindle mengenai kapasitas organisasi, yaitu ;

“Capacity Building is intended to encompass a variety of strategies that have to do with increasing the efficiency, effectiveness, and

responsiveness of government performance” (Grindle and Hildebrand 1997, 444-446) Menjelaskan bahwa pembangunan kapasitas merupakan upaya yang dimaksudkan untuk mengembangkan berbagai macam strategi yang dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas dari kinerja pemerintah, karena sebuah organisasi dituntut untuk melaksanakan kegiatannya secara efektif dan efisien, oleh karenanya dibutuhkan sebuah kapasitas yang harus dimiliki oleh organisasi untuk mencapai tujuannya tersebut. Sementara itu Hall, dkk (2003) Mengemukakan bahwa kapasitas keseluruhan dari organisasi untuk menghasilkan output dan hasil adalah fungsi dari kemampuannya untuk menggunakan berbagai jenis modal organisasi seperti sumber daya manusia, keuangan hubungan dan jaringan, infrastruktur dan proses, dan perencanaan dan pengembangan.

Memahami kapasitas organisasi secara keseluruhan dapat mempengaruhi output organisasi serta dalam konteks tertentu akan membantu melihat internal karakteristik organisasi secara lebih mendalam. Kemudian dengan memahami kapasitas organisasi akan membantu suatu organisasi mencapai target yang lebih baik dalam mengalokasikan sumber daya yang ada. Sementara itu Horton (Horton, et al. 2003, 19-34) mengemukakan elemen kapasitas organisasi agar organisasi berjalan dengan baik dibagi menjadi berikut ;

## 1. Sumber Daya (Resources)

Sumber daya yang mencakup hal-hal yang secara tradisional atau aspek-aspek yang dibutuhkan pada sebuah organisasi dan dianggap sebagai kapasitas yang 'sulit', seperti infrastruktur, teknologi, keuangan, dan kepegawaian. Sumber Daya Manusia (Human Resources)

Sumber daya manusia merupakan hal yang tidak bisa lepas dari sebuah organisasi. Berkaitan dengan kemampuan organisasi untuk mengerahkan sumber daya manusia (yaitu, staf dan relawan yang dibayar) di dalam organisasi, termasuk sebuah pelatihan yang sangat penting untuk mengasah kemampuan sumber daya manusia organisasi tersebut.

Infrastruktur, Teknologi dan Sumber Finansial (Infrastructure, technology and financial resources)

Sumber daya lainnya selain sumber daya manusia meliputi fasilitas, kendaraan, peralatan, dan dana yang siap digunakan untuk sebuah organisasi agar bisa mencapai tujuannya.

## 2. Manajemen (Management)

Manajemen harus menciptakan kondisi di mana tujuan yang ditetapkan tepat dan dapat dicapai. Kegiatan manajerial meliputi perencanaan, penetapan tujuan, penentuan tanggung jawab, memimpin,

mengalokasikan sumber daya, memotivasi dan mengawasi anggota staf, dan menjaga hubungan dengan pemangku kepentingan. Untuk berkinerja baik, semua organisasi membutuhkan sumber daya yang memadai serta kepemimpinan dan manajemen yang kompeten dan berdedikasi. Namun, organisasi yang berbeda akan memiliki kebutuhan kapasitas yang berbeda tergantung pada misi mereka, lingkungan operasi mereka, dan kekuatan dan kelemahan mereka di bidang kapasitas yang berbeda. Sementara pentingnya mengembangkan sumber daya

fisik, keuangan, dan profesionalisme tidak boleh diremehkan. Berbagai kegiatan ini dapat dikelompokkan dalam tiga konteks; kepemimpinan strategis, program dan manajemen proses, serta jaringan dan hubungan.

### Kepemimpinan yang Strategis

Kepemimpinan strategis adalah kapasitas untuk menilai dan menafsirkan kebutuhan dan peluang di luar organisasi, untuk menetapkan arah, untuk mempengaruhi dan menyelaraskan orang lain menuju tujuan bersama, untuk memotivasi mereka dan berkomitmen untuk bertindak, dan untuk membuat mereka bertanggung jawab atas kinerja mereka. Kualitas kepemimpinan organisasi memiliki pengaruh yang kuat atas arahnya, motivasi kepada stafnya, dan kinerja keseluruhannya.

### Manajemen Program dan Proses

Berkaitan dengan program yang dimiliki oleh organisasi dan bagaimana mereka mengambil keputusan dalam manajemen program yang akan berdampak langsung pada kinerja organisasinya. Manajemen proses juga berkaitan dengan pengelolaan sumber daya dan proses internal yang mendukung organisasi tersebut. Ini termasuk pengembangan staf, penggalangan dana, manajemen keuangan, dan manajemen fasilitas.

Meskipun sering dianggap sebagai kepentingan sekunder, manajemen sumber daya dan proses internal yang memadai diidentifikasi sebagai bidang utama untuk pengembangan kapasitas di banyak organisasi, karena mereka sangat penting untuk penyampaian tujuan program yang efektif.

### Jaringan dan Hubungan

Jaringan dan keterkaitan menjadi lebih penting karena organisasi semakin beroperasi dalam jaringan hubungan yang kompleks dan berkembang. Di masa lalu, ada kecenderungan bagi individu untuk bekerja sendiri atau dalam unit kecil dalam organisasi mereka sendiri. Tetapi saat ini, organisasi dan staf mereka sering terkait erat dengan organisasi dan individu lain. Para pemangku kepentingan dan mitra yang semakin beragam

mendesak organisasi untuk melibatkan mereka dalam semua aspek pekerjaan mereka, mulai dari prioritas pengaturan dan penggalangan dana untuk penyampaian program dan hasil evaluasi dari programnya. Organisasi harus semakin memperhatikan jaringan dan hubungan (Horton, et al. 2003, 19-34)

## **METODE**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sebagaimana dikatakan Nawawi (dalam Sugiyono, 2017) bahwa metode deskriptif memusatkan perhatian terhadap masalah masalah atau fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan atau bersifat aktual, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi rasional yang akurat. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa Kacaribu, Pegawai/staff BUMDes Kacaribu, BPD Desa Kacaribu dan Masyarakat Desa Kacaribu. Selain melakukan wawancara pengumpulan data juga dilakukan dengan observasi langsung dan dokumentasi. Lalu peneliti menganalisis data dengan mereduksi data, dilanjutkan dengan penyajian data hingga akhirnya penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan dan analisis dalam penelitian ini merupakan suatu data dan fakta yang peneliti dapatkan langsung dari lapangan bahwa teori yang peneliti gunakan yaitu menggunakan teori Horton, et al. (2003:28). Teori Horton tersebut merujuk identifikasi masalah dan dijelaskan bahwa dalam melihat kapasitas dari organisasi diperlukan beberapa indikator yaitu sumber daya manusia (Human Resources), Infrastruktur, teknologi, sumber daya keuangan (infrastructure, technology

and financial resources), Kepemimpinan (Strategic Leadership), Program dan Proses Manajemen (Program and process management), Jaringan/Kerjasama (Networking and linking to other organizations and stakeholders).

## **Sumber Daya Manusia/Human Resources**

Menurut (Horton et al., 2003), dalam kapasitas organisasi dimensi sumber daya manusia dikatakan memadai ketika prosedur perekrutan pegawai, jumlah pegawai, dan kompetensi pegawai serta pengembangan pegawai sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan organisasi.

Prosedur rekrutmen sumber daya manusia BUMDes Lau Siangin dilaksanakan melalui proses seleksi. Kepala Desa membuka lowongan untuk menjadi ketua, sekretaris dan bendahara BUMDes dan masyarakat akan melamar kemudian disayembarakan juga dilakukan wawancara dan serangkaian tes sampai akhirnya memutuskan sumber daya manusia yang direkrut. Sumber daya manusia untuk pengurus BUMDes Desa Kacaribu diperoleh dari sumber internal, yaitu dari masyarakat desa Kacaribu yang sebelumnya pernah menjadi pengurus BUMDes maupun dari masyarakat yang sebelumnya belum pernah menjadi pengurus BUMDes.

Dalam bidang sumber daya manusia, ada dua aspek yang akan di analisis yaitu aspek kualitas dan aspek kuantitas. Secara kualitas, sumber daya manusia yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lau Siangin termasuk kurang memadai, dan dalam hal kuantitas sumber daya manusia BUMDes Lau Siangin sudah cukup dalam mengelola unit usaha. Latar belakang pendidikan yang rendah dimiliki personel BUMDes Lau Siangin rata-rata tamatan SMA, dan hanya ada beberapa yang tamatan sarjana. Kurangnya kompetensi dan keterampilan mengakibatkan kapasitas organisasi belum optimal mengelola potensi desa yang ada. Dalam rangka menghadapi persaingan dan

tantangan era digital dimana sekarang tiap pekerjaan menuntut sumber daya manusia mampu menggunakan teknologi dan informasi.

Kebanyakan pengurus BUMDes menjalani pekerjaan diluar BUMDes sehingga kurang fokusnya pengurus dalam mengelola BUMDes, Seharusnya pengurus BUMDes harus menjalani satu pekerjaan sehingga tidak merangkap pekerjaan diluar BUMDes karena SDM sebagai kunci untuk bisa mengembangkan atau memajukan BUMDes.

### **Infrastruktur, Teknologi dan Keuangan**

Sumber daya sebagai salah satu komponen utama kapasitas kelembagaan terdiri dari sumber daya manusia (pegawai/karyawan) dan sumber daya bukan manusia yang dapat berupa infrastruktur, teknologi, dan keuangan.

Infrastruktur adalah alat dan perlengkapan yang dimiliki dan dibutuhkan dalam menunjang pengelolaan potensi desa. Infrastruktur utama BUMDes Lau Siangin adalah gedung kantor yang terletak di dekat Los desa Kacaribu. Kondisi ruangan dan bangunan tertata sangat rapi dan terawat dan sudah dilengkapi sarana dan prasarana kantor seperti meja, kursi, peralatan ATK, printer, dan komputer. Kondisi dari fasilitas administrasi perkantoran juga dalam keadaan baik. BUMDes Lau Siangin telah menyediakan fasilitas IT seperti komputer, wifi dan printer. Secara keseluruhan kondisi sarana prasarana dalam hal kelengkapan perkantoran sudah cukup baik dan memenuhi terlaksananya kegiatan.

Dimensi teknologi, dimensi ini melihat sejauh mana organisasi mampu menerapkan teknologi dan memanfaatkannya dengan maksimal untuk membantu menjalankan tugas organisasi (Horton et al., 2003). Hasil observasi peneliti melihat bahwa pengurus BUMDes Lau Siangin belum terlalu memahami dengan teknologi-teknologi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pengelolaan BUMDes Lau Siangin Desa Kacaribu. Pengurus

BUMDes Lau Siangin menggunakan handphone/whatsapp sebagai alat komunikasi dalam memberikan informasi-informasi terkait kegiatan di tiap unit usaha dan software dari laptop seperti microsoft excel untuk mendata dan microsoft word untuk membuat surat. Seperti pada unit usaha PAMDes yang masih melakukan pencatatan pelanggan air bersih secara manual ditulis di buku. Pengelola unit belum mampu menggunakan microsoft excel untuk mendata pelanggan dalam mempermudah pengutipan tiap bulannya. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan lagi agar lebih baik lagi dalam penggunaan teknologi.

BUMDes Lau Siangin belum memiliki sistem informasi berbasis website sendiri untuk mempublikasikan kegiatan tiap unit usaha. Hal ini menghambat kegiatan promosi dan penyebaran informasi ataupun sebagai pengenalan profil. Pengelolaan atau penyebaran informasi yang dilakukan masih manual dengan cara penyebaran informasi melalui grup whatsapp, surat, face to face yang diadakan di musyawarah desa setiap triwulan.

Selanjutnya terkait dengan sumber daya keuangan yang ada di BUMDes Lau Siangin. Masalah keuangan dalam BUMDes secara umum diatur dalam Kemendagri Nomor 39 Tahun 2010 dan PP Nomor 72 Tahun 2005. Sumber daya finansial dalam pengembangan unit usaha BUMDes Lau Siangin yang dialokasikan masih kurang memadai. Keterbatasan anggaran merupakan kelemahan utama dalam menjalankan kegiatan BUMDes. Modal BUMDes bersumber dari pemerintah desa. Jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh BUMDes berdasarkan potensi desa dan informasi yang tersedia di pasar.

### **Kepemimpinan/Strategic Leadership**

Menurut Robbins (2006:432) menyatakan kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi kelompok menuju pencapaian sasaran. Sedangkan menurut Kartono (2006:153) menyatakan kepemimpinan adalah

kemampuan untuk memberikan pengaruh yang konstruktif kepada orang lain untuk melakukan suatu usaha kooperatif mencapai tujuan yang sudah direncanakan.

Sesuai dengan kondisi yang ditemui di lapangan, Manajer BUMDes Lau Siangin menggunakan strategi komunikasi yang melibatkan pimpinan dan bawahan sebagai usaha untuk mengintegrasikan visi dan misi serta sebagai sarana untuk memastikan pelaksanaan tugas telah berjalan sesuai dengan target. Bentuk komunikasi yang digunakan secara standar adalah penyelenggaraan pertemuan-pertemuan rutin dengan seluruh pengurus dalam bentuk rapat rutin minimal sekali dalam sebulan. Adapun rapat pengendalian yang melibatkan karyawan pada masing-masing unit diselenggarakan dalam intensitas yang lebih sering, sesuai dengan perkembangan program kerja. Dalam setiap rapat koordinasi selain membahas mengenai laporan masing-masing unit juga membahas mengenai persoalan-persoalan yang dialami unit usaha.

Pengurus dan Karyawan BUMDes Lau Siangin dalam memberikan pelayanan dan menjalankan kegiatan usahanya berpedoman pada tupoksi masing-masing bidang kerja. Dari tupoksi tersebut, sudah disusun detail panduan kerja bagi masing-masing bidang pekerjaan. Sehingga dalam hal pembagian tugas yang terperinci bagi bawahan bisa terwujud.

### **Program dan Manajemen Proses/Program and process management**

Dalam dimensi ini, seperti yang disampaikan (Horton et al., 2003) bahwa manajemen program berguna untuk melihat bagaimana pengelolaan program agar dapat terencana dan terlaksana sehingga mampu mencapai tujuan organisasi. Penguatan kapasitas organisasi selain membutuhkan dukungan sumber daya juga membutuhkan manajemen program. Pada perkembangannya, potensi

alam yang di kelola sangat memuaskan, unit usaha yang terbentuk dari potensi alam Desa Kacaribu yang telah berjalan antara lain : PAM Desa, Kolam atau Embung Desa, Los/jambur dan terakhir Depot Air Minum.

Dimensi program dan manajemen proses secara operasional dapat dilihat dari perencanaan dan perumusan program, pemantauan dan evaluasi serta adanya pelaporan. Penentuan dan perumusan program dilaksanakan berdasarkan musyawarah desa di Desa Kacaribu. Sejauh ini program yang disusun sudah terlaksana seluruhnya. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh BPD selaku badan pengawas BUMDes, pemantauan dan evaluasi keuangan juga dilaksanakan Dinas PMD secara rutin. Selain itu pelaporan BUMDes terkait modal yang berasal dari pemerintah desa dilaporkan melalui musyawarah desa.

### **Jaringan Kerja**

Kapasitas Jaringan (networking capacity) didefinisikan sebagai kemampuan organisasi untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan pihak lain, baik di dalam maupun di luar masyarakat, hal ini menjadi penting karena mendukung keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya. Jaringan kerja menunjuk kepada kerja sama dari sejumlah organisasi yang terlibat dalam menyelesaikan suatu tugas tertentu. Menurut Hilderbrand dan Grindle, semakin baik kemampuan organisasi dalam berkoordinasi dengan organisasi lain, semakin baik kerjasama yang terjalin sehingga meningkatkan kapasitas organisasi dalam melaksanakan fungsinya. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lau Siangin mengembangkan hubungan kemitraan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.

Sebagai bentuk efektivitasnya dilihat dari adanya BRILink sangat membantu masyarakat sekitar khususnya masyarakat yang ada di Desa Kacaribu untuk melakukan transaksi yang seperti ada di Bank BRI. Tujuan dari

BRLink adalah mempermudah masyarakat mengenai transaksi, seperti transfer menabung dan pembayaran lainnya. Pembagian keuntungan dengan pihak BRI 50 banding 50.

Tujuan dari hubungan kemitraan ini yaitu dapat memperkuat kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi entitas bisnis yang sukses. BRLink merupakan program layanan Bank BRI dengan BRLink, BRI bisa mencapai nasabah yang berada di area terpencil tanpa harus membangun kantor di area tersebut.

## SIMPULAN

Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lau Siangin masih mengalami hambatan dalam pengelolaan potensi desa di Desa Kacaribu. Hal ini dapat dilihat sumber daya manusia yang belum memiliki profesionalitas dalam mengelola potensi desa yang disebabkan sebagian besar pengelola BUMDes adalah karyawan paruh waktu yang memiliki pekerjaan lain selain di BUMDes. Juga dalam penggunaan teknologi pegawai belum mampu memanfaatkannya dengan maksimal untuk mempromosikan potensi yang ada dan sumber daya keuangan untuk mendukung kegiatan pelaksanaan masih belum memenuhi keperluan di tiap unit usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Grindle, M. S. (Ed.). (1997). *Getting good government: Capacity building in the public sector of developing countries*. Boston: MA: Harvard Institute for International Development.
- Horton, D., Alexaki, A., Bennet-Lartey, S., Brice, K.N., Campilan, D., Carden F., ... Watts, I. (2003). *Evaluating capacity development: Experiences from research and development organizations around*

the world. The Netherlands: International Service for National Agricultural Research (ISNAR); Canada: International Development Research Centre (IDRC), the Netherlands: ACP-EU Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation (CTA).

- Kartono, Kartini. (2008). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Milen, A. (2006). *Pegangan dasar pengembangan kapasitas*. Diterjemahkan secara bebas. Yogyakarta: Pondok Pustaka Jogja.
- Robbins, P. Stephen. (2006). *Perilaku Organisasi*. Edisi Sepuluh. Diterjemahkan oleh: Drs. Benyamin Molan. Jakarta : Erlangga
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta, Cetakan ke-24
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. (2004). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi kedelapan. Jakarta : Erlangga
- Sumber Jurnal Dan Skripsi
- Fifiyanti, Alyas, Mone, A., (2018). „Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha milik Desa Di Desa Patani Kecamatan Mappkasunggu Kabupaten Takalar”. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, vol. 4, no. 3, hh. 282-296.
- Fiszbein, A. (1997). *The emergence of local capacity: Lesson from Columbia*. *World Development*, 25(7), 1029-1043.
- Glickman, Norman J., and Lisa J. Servon (2003). *By the Numbers: Measuring Community Development Corporation Capacity*, *Journal of Planning Education and Research* 22:240-256
- Sumber Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Desa Kacaribu Nomor 04  
Tahun 2020 tentang Badan Usaha  
Milik Desa (BUMDes)

Sumber Internet

[https://kemendes.go.id/berita/view/d  
etil/3776/b](https://kemendes.go.id/berita/view/detail/3776/bumdes-jadi-kunci-) umdes-jadi-kunci-

pemulihan-ekonomi-tingkat desa  
[https://www.cnnindonesia.com/ekon  
omi/201905 29101814-532-  
399423/bpk-bumdes-belum  
berkontribusi-penuh-pada-ekonomi-  
desa](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190529101814-532-399423/bpk-bumdes-belum-berkontribusi-penuh-pada-ekonomi-desa)